

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan ekonomi Indonesia yang sangat pesat sekarang ini, menuntut adanya kemampuan manajerial untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien. Dalam dunia pemerintahan, pembangunan suatu negara sangat berpengaruh pada potensi daerah dengan sumber daya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi daerah sangat penting sekali untuk ditingkatkan guna menunjang peningkatan ekonomi nasional. Dalam konteks ini, peran kebijakan pemerintah yang efektif dan efisien sangatlah penting diperlukan baik kebijakan ekonomi untuk daerah maupun kebijakan ekonomi untuk pemerintah pusat.

Secara umum, pembangunan dapat diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan manusia. Pembangunan di negara kita tidaklah hanya difokuskan pada pembangunan yang bersifat fisik saja, akan tetapi ditunjang oleh pembangunan mentalnya. Hal tersebut di atas direalisasikan secara bertahap guna membentuk kepribadian bangsa Indonesia yang mantap serta mandiri dalam menghadapi tantangan zaman yang kian hari kian sulit. Hal ini didasarkan mengingat peranan usaha pembangunan pihak pemerintah, dimana untuk menjaga agar pembangunan berjalan seperti yang diinginkan perlu adanya sistem

pengendalian pembangunan yang efektif dan efisien. Hal ini juga disebabkan karena di dalam setiap usaha pembangunan terutama di negara-negara yang sedang berkembang selalu dihadapi dengan persoalan keterbatasan daripada sumber-sumber kemampuan baik biaya, tenaga dan waktu dibandingkan dengan kebutuhan, karena itu pembangunan tidak mungkin dilaksanakan secara serentak melainkan secara bertahap. Pengendalian pembangunan meliputi usaha-usaha perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Pembangunan fisik memfokuskan pada pembangunan berupa sarana dan prasarana yang menunjang terhadap pelaksanaan pemerintahan. Pembangunan yang berkaitan dengan sistem ekonomi mempunyai peranan yang penting dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional. Di lain pihak faktor lain yang ikut menunjang terhadap keberhasilan pembangunan perekonomian di negara kita ini adalah peran serta seluruh masyarakat baik itu dari kalangan bawah, menengah ataupun dari kalangan atas yang mempunyai sifat saling menunjang antara satu dengan yang lainnya. Masalah yang sering dihadapi dalam pembangunan diantaranya masalah pendanaan dalam hal ini adalah anggaran.

Menyadari akan pentingnya aspek pendanaan, pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa masalah keuangan merupakan suatu hal yang harus diatur dan diarahkan untuk kepentingan masyarakat luas. Namun kenyataannya tidak seperti apa yang diharapkan, dimana

penggunaan anggaran selalu tidak tepat sasaran, hal ini didasarkan pada cara pandang pemerintah yang bersifat birokrat, dalam hal ini menghabiskan anggaran yang ada dan melaksanakan program yang kurang tepat sasaran. Untuk menghindari hal yang demikian maka diperlukan suatu pengawasan terhadap penggunaan anggaran agar bisa menjadi lebih efisien dan efektif.

Agar pengawasan dapat berjalan dengan efisien dan efektif, maka perlu adanya sistem yang baik daripada pengawasan itu. Sistem yang baik ini menurut Newman (1988: 2.1) memerlukan beberapa syarat antara lain: *Pertama*, harus memperhatikan atau disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan organisasi. *Kedua*, harus mampu menjamin adanya tindakan perbaikan. *Ketiga*, harus bersifat fleksibel. *Keempat*, harus memperhatikan faktor-faktor dan tata organisasi di dalam mana pengawasan itu dilaksanakan. *Kelima*, harus ekonomis dalam hubungan biaya. *Keenam*, harus diperhatikan pula prasyarat sebelum pengawasan itu dimulai yaitu harus ada rencana yang jelas dan pola/tata organisasi yang jelas.

Dalam pemerintahan daerah Kabupaten Gorontalo Utara pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan secara triwulan, dimana untuk masing-masing SKPD harus memberikan laporan realisasi fisik dan keuangan SKPD, hal ini diperlukan untuk melihat sejauhmana efektivitas pengendalian anggaran yang telah dilakukan. Pengawasan realisasi fisik dan keuangan SKPD yang ada dipemerintahan Kabupaten Gorontalo

Utara belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, hal ini terkait dengan SKPD-nya itu sendiri dalam memberikan laporan realisasinya kurang serius, ketidakseriusan mereka terlihat dari sifat mereka yang seolah-olah menyepelkan hal tersebut, dalam hal ini masih banyak SKPD yang lambat dalam memberikan laporan realisasinya.

Dilakukannya pengawasan realisasi fisik dan keuangan, agar program-program yang ada sudah terealisasi tepat waktu sehingga di akhir tahun nanti tidak berpacu lagi dengan namanya program-program yang tertunda, Pengawasan juga dilakukan untuk mencegah yang namanya pemanipulasian data, dimana pengadaan yang masih dalam proses perencanaan sudah dibuatkan laporan realisasi fisik dan keuangannya, untuk itu dibutuhkan pengawasan agar tidak terjadi hal-hal yang menyimpang dalam hal penggunaan anggaran.

Dengan adanya pengawasan realisasi fisik dan keuangan SKPD diharapkan bisa berdampak pada pengendalian anggaran yang efektif pada setiap SKPD yang ada di Kabupaten Gorontalo utara dan menjadi bahan pertimbangan untuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan pihak DPRD untuk memberikan anggaran di tahun berikutnya.

Demikian pula hal yang perlu diperhatikan tentang pengawasan anggaran yang ada di daerah yaitu rendahnya independensi manajemen pemerintahan yakni ketika informasi disajikan oleh pihak yang memiliki kepentingan sendiri terhadap laporannya, pengguna informasi tersebut harus menguji keandalan data yang diberikan. Suatu informasi diragukan

kebenarannya ketika interaksi antara sumber informasi dan penggunanya rendah. Semakin rendah interaksi yang terjadi antara sumber informasi dan pengguna maka semakin penting bagi pengguna informasi untuk menguji reabilitas informasi yang disajikan, dan di saat yang bersamaan pengujian reabilitas semakin sulit.

Dengan memperhatikan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran pemerintah daerah dapat menjamin kelancaran tugas sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan administrator sosial kemasyarakatan, maka anggaran yang tersedia diharapkan dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien dan transparan.

Penelitian ini diperkuat oleh penelitian terdahulu walaupun ada sedikit perbedaan dari variabel X maupun variabel Y-nya. Penelitian Fuadi (2013) yang berjudul Pengaruh Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran, dengan hasil penelitiannya bahwa pengawasan preventif dan pengawasan detektif berpengaruh signifikan positif terhadap efektifitas pengendalian anggaran pada SKPD. Artinya, jika pengawasan preventif dan pengawasan detektif semakin baik maka efektifitas pengendalian anggaran pemerintah akan semakin baik pula.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Mohamad yang berjudul Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Pengendalian dengan hasil penelitiannya bahwa penerapan anggaran

berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengendalian.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut seberapa besar Pengaruh Pengawasan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran Di Kabupaten Gorontalo Utara.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- 1) Kurang seriusnya SKPD dalam melaporkan Realisasi Fisik dan Keuangan.
- 2) Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD belum sepenuhnya Efektif dan Efisien.
- 3) Rendahnya Efektivitas Pengendalian Anggaran.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pengawasan realisasi fisik dan keuangan SKPD berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian anggaran di Kabupaten Gorontalo Utara?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah pengawasan realisasi fisik dan keuangan SKPD berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian anggaran di Kabupaten Gorontalo Utara.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

##### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu akuntansi maupun manajemen keuangan daerah, khususnya yang berkaitan dengan pengawasan realisasi fisik dan keuangan serta pengelolaan yang baik terhadap penggunaan anggaran.

##### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Berdasarkan segi praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan yaitu aparat pemerintah (SKPD) dalam memberikan laporan realisasi fisik dan keuangan serta menggunakan anggaran daerah sebaik mungkin guna mencapai pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat.